



UPAH BURUH DITETAPKAN 6 DESEMBER 2022

# UMK Langsung Berlaku Januari 2023

**YOGYA (MERAPI)** - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menyebut rekomendasi upah minimum kota (UMK) 2023 masih dibahas yang hasilnya akan disampaikan lebih cepat sehingga penetapan upah minimum tahun depan juga bisa segera dilakukan sebelum batas waktunya.

UMK 2023 akan langsung berlaku mulai Januari 2023 dan perusahaan tidak lagi diperbolehkan menyampaikan pengajuan, penundaan, atau membayar upah dengan cara dicil.

"Kota dan Kabupaten di DIY sudah bersepakat bahwa upah minimum akan ditetapkan pada 6 Desember atau lebih cepat dari batas waktu penetapan pada 7 Desember," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Maryustion Tonang dilansir dari Antara di Yogyakarta, Rabu (30/11).

Penetapan UMK 2023 akan dilakukan oleh Gubernur DIY berdasarkan hasil usulan atau rekomendasi dari masing-masing

kepala daerah kota dan kabupaten. "Rekomendasi dari kepala daerah atau di Kota Yogyakarta adalah penjabat wali kota berasal dari hasil penghitungan UMK yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota sesuai rumus dan ketentuan yang berlaku," katanya.

Menurut Maryustion, penghitungan UMK 2023 tetap akan didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dilengkapi dengan faktor koefisien pengali atau nilai alfa. Nilai tersebut didasarkan pada produktivitas serta perluasan kesempatan kerja di setiap wilayah kota/kabupaten. "Yang pasti, nilai UMK tidak turun. Namun untuk kepastian nilainya, tentu

harus menunggu sampai ditetapkan secara resmi oleh DIY," paparnya. Nilai UMK Kota Yogyakarta pada 2022 sebesar Rp 2.153.970 per bulan.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengatakan, proses penghitungan UMK 2023 masih berjalan. "Mudah-mudahan ada kesepakatan dan proses pengajuan usulan bisa berjalan dengan baik. Usulan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Kesejahteraan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Rihari Wulandari mengatakan, penghitungan UMK 2023 dilakukan setelah pemerintah provinsi menetapkan upah minimum provinsi (UMP).

UMK 2023 akan langsung berlaku mulai Januari 2023 dan perusahaan tidak lagi diperbolehkan menyampaikan penangguhan, penundaan, atau



**Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Maryustion Tonang.**

membayar upah dengan cara dicil. "Kondisi perekonomian sepertinya sudah membaik karena saat ini sangat jarang kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan lainnya. Beda dengan saat pandemi karena banyak pekerja yang dirumahkan, tidak dibayar atau terkena

PHK dengan pesangon tidak sesuai," katanya.

Rihari bahkan mengatakan, perusahaan mulai membenahi administrasi menyesuaikan UU Cipta Kerja, salah satunya mencatat pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). (\*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005